

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Inggris telah mengalami suatu proses yang luar biasa dan bersejarah. Ia merupakan negara pertama yang keluar dari Institusi Uni Eropa. Sesuatu yang sulit terprediksi dikarenakan selisih antara kedua kubu yang tipis sehingga memunculkan banyak peluang kemungkinan. Kemunculan euroskeptis di Inggris nyata halnya. Mereka adalah golongan yang menentang supremasi Uni Eropa dengan mengedepankan isu-isu independensi dan imigran.

Ketika gerakan masyarakat ini kemudian menjadi *masive* maka kemudian memunculkan suatu gerakan yang nyata. Yakni referendum. Hasil referendum kemudian menimbulkan sedikit guncangan dalam tubuh pemerintah di mana Perdana Menteri, David Cameron, mengundurkan diri karena pada dasarnya ia adalah pendukung kubu remain. Posisi tersebut kemudian diisi oleh Theresa May yang sebelumnya adalah Menteri Dalam Negeri. Dan May sendiri merupakan pendukung kubu remain juga.

Eksekutif di bawah kepemimpinan May berusaha menghormati apa yang dikehendaki oleh rakyat dari hasil referendum. Maka kemudian ia segera melaksanakan negosiasi dan upaya agar Inggris segera mewujudkan brexit. Di dalam Uni Eropa sendiri terdapat suatu acuan pedoman bagi negara yang ingin keluar dari keanggotaan Uni Eropa, yakni pasal 50 *Treaty of Union* (TEU). Berdasarkan dari pasal tersebut suatu negara harus mengeluarkan notifikasi untuk mengundurkan diri berdasarkan dari keputusan konstitusi negara terkait.

Inggris membutuhkan suatu notifikasi untuk keluar dari Uni Eropa berdasarkan konstitusinya. Oleh karena itu eksekutif Inggris, yang telah menjadikan brexit sebagai agenda mereka, segera membawa RUU untuk diloloskan sesuai konstitusi mereka, yakni melalui proses parlementer yang melewati dua kamar. Kedua kamar tersebut adalah *House of Commons*, yang berfungsi untuk membuat atau menggagalkan suatu RUU, dan *House of Lords*, yang berfungsi untuk menengguhkan atau mengamandemen suatu RUU.

Dalam proses *House of Commons* terjadi perdebatan mengenai keputusan ini, diantaranya adalah masalah imigran yang disangsikan bagaimana nasibnya. Amber Rudd selaku Menteri Dalam Negeri kemudian menegaskan bahwa status mereka akan dijamin selama proses brexit berlangsung. Pada akhirnya sesi ini menghasilkan kemenangan untuk meloloskan RUU tersebut dengan jumlah agregat yang cukup timpang, yakni 494 dari 650 suara. Ketika dibawa ke dalam sesi *House of Lords* muncul persetujuan dengan syarat amandemen berkenaan dengan status imigran. Ketika dikembalikan ke *House of Commons* amandemen tersebut ditolak. Dan pada akhirnya *House of Lords* menyetujui RUU sesuai persetujuan awal. Maka akhirnya lahirlah sebuah Undang-Undang sebagai notifikasi untuk keluar dari Uni Eropa. Undang-Undang tersebut bernama *European Union (withdrawal) Act*. UU tersebut kemudian menjadi landasan Inggris untuk memulai upaya keluar dari Uni Eropa sesuai pedoman pada pasal 50 TEU.

Proses pemisahan diri dari Uni Eropa ini merupakan contoh demokrasi yang luar biasa. Berawal dari kehendak rakyat, yang kemudian menjadi isu nasional dan dibahas dalam ruangan yang diisi oleh orang-orang yang juga dipilih oleh rakyat dan akhirnya menjadi sebuah keputusan yang berdampak pada skala regional.

## 6.2 Saran

Isu brexit dan adalah suatu isu yang tergolong baru dan memerlukan banyak penelitian. Ke depannya ia akan semakin menarik karena menimbulkan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi Inggris berhasil memenuhi tuntutan, yakni 2 tahun perjuangan. Nantinya akan membuat penasaran bagaimana ia mengisi episode lanjutan.

Namun ada juga kemungkinan Inggris gagal. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Inggris mengingat hal ini telah menjadi persetujuan domestik dan nasional? Oleh karena itu mengangkat topik ini menjadi suatu hal yang menyenangkan sekaligus mendebarkan. Karena studi terdahulu terkait kasus yang sama masih sedikit. Namun jika peneliti yang selanjutnya bisa memberikan hasil tulisan yang mengesankan maka karyanya akan menjadi panutan dan tidak terlupakan